



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum SKPD

Dinas Kelautan Dan Perikanan Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 162 Tahun 2001 tanggal 13 April 2001. Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat secara umum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Pembangunan Nasional dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang kemudian secara hierarkis dituangkan kedalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Provinsi dan urusan pembantuan yang di berikan oleh Pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2018 merupakan tahun Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2013 – 2018 setelah pelaksanaan Pilkada langsung Provinsi Kalimantan Barat. Kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD

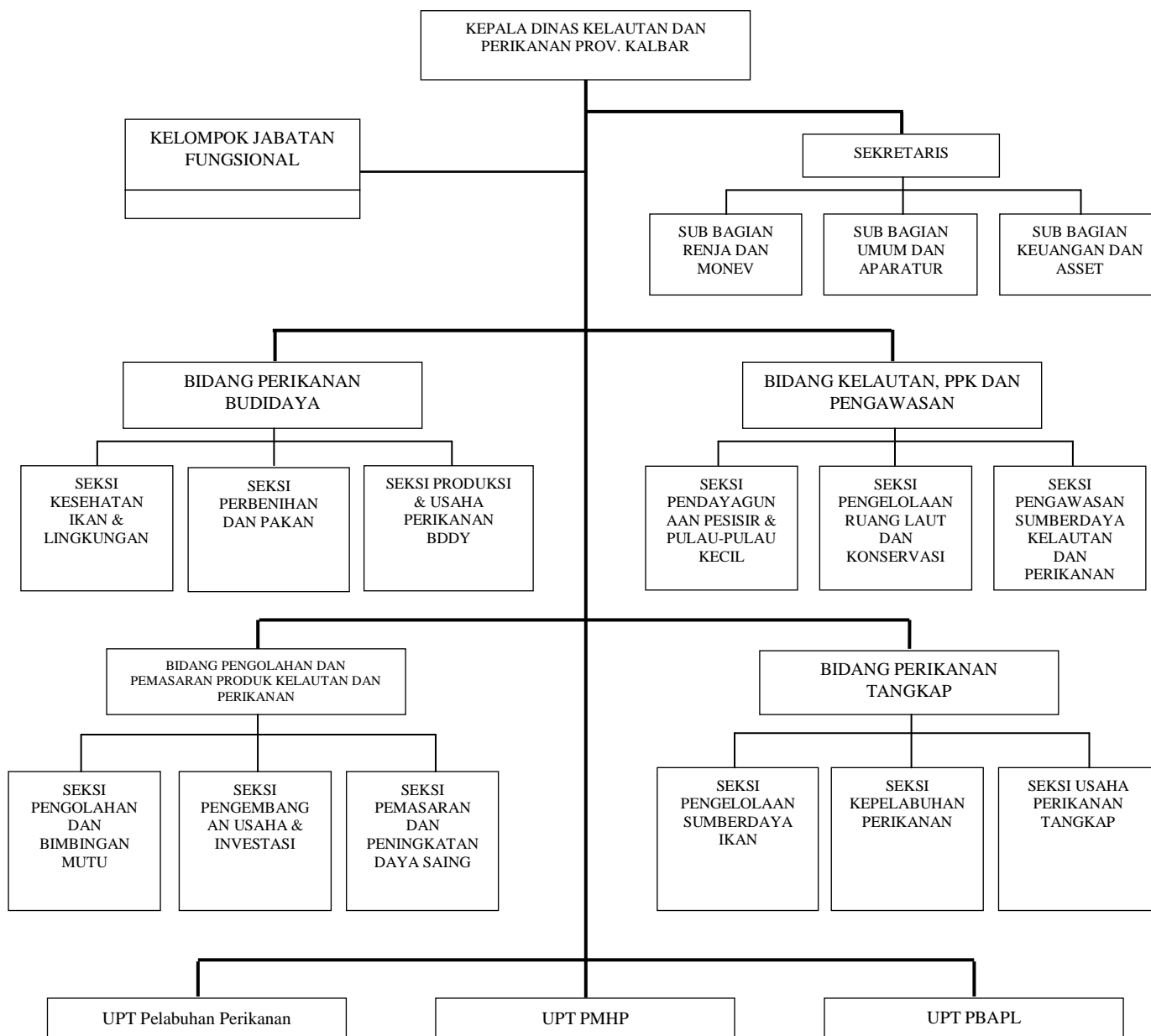
Bagan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini (*sesuai perda no. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat*)



Tabel. 1

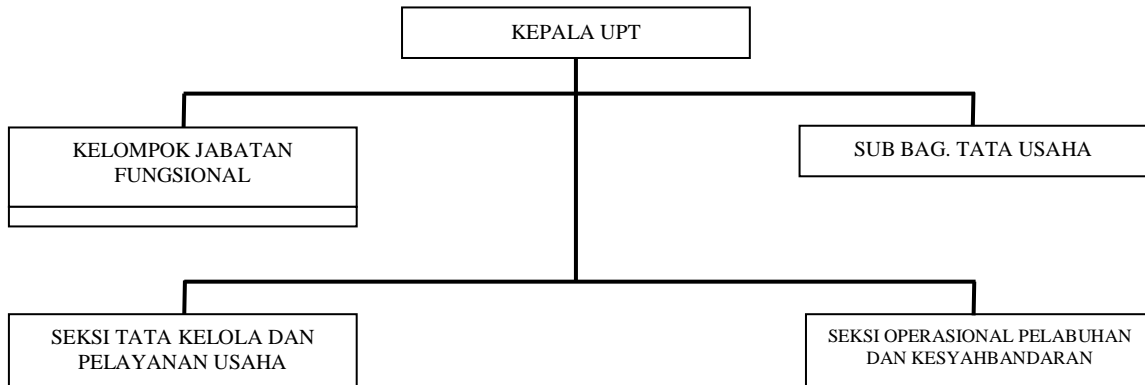
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR

(Sesuai Pergub Nomor 114 Tahun 2016)

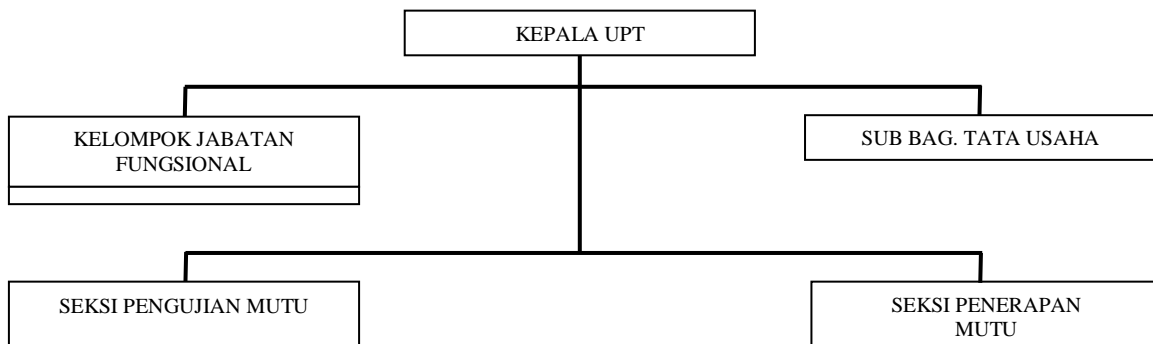




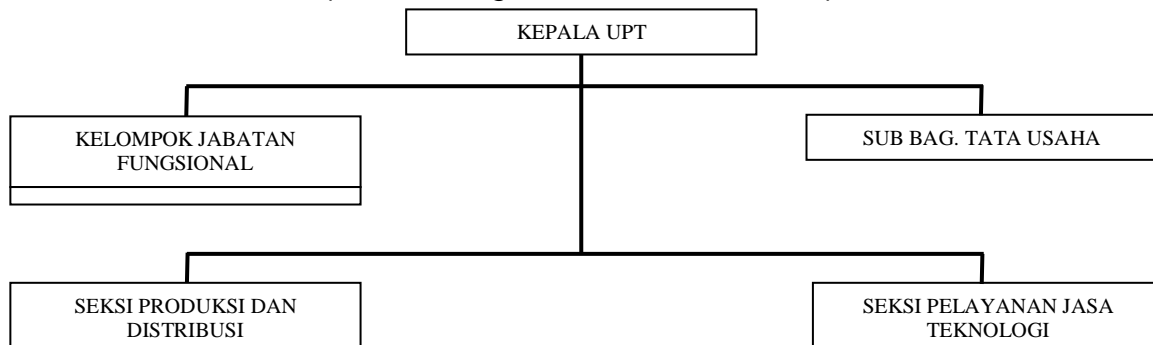
STRUKTUR ORGANISASI UPT PELABUHAN PERIKANAN
(Sesuai Pergub No. 89 Tahun 2017)



STRUKTUR ORGANISASI UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (UPT - PMHP)
(Sesuai Pergub No. 90 Tahun 2017)



STRUKTUR ORGANISASI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT PBAPL)
(Sesuai Pergub No. 91 Tahun 2017)





C. Gambaran Umum SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

- Fungsi :

 - Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan ;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
 - Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan ;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
 - Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi UPT SKPD

a. UPT Pelabuhan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan di bidang pelabuhan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan program kerja UPT Pelabuhan Perikanan;
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Pelabuhan Perikanan;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan (sandar dan tambat labuh) kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan di pelabuhan perikanan;
- f. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan log book, pelayanan bongkar muat produk perikanan;
- h. Pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- i. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- j. Pelaksanaan pelayanan tugas kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- k. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkarantinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pelabuhan perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.



b. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan program kerja UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Penerapan mutu Hasil Perikanan;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang keamanan pangan hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis menguji ketelitian dan kecermatan pekerjaan laboratorium;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis pengujian ketelitian dan kecermatan pekerjaan laboratorium;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang penerapan mutu hasil perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

c. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang perikanan budidaya air payau dan laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Penyusunan program kerja UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut



- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi dan distribusi;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan jasa teknologi;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyediaan induk dan benih unggul ikan air payau dan laut yang bersertifikasi;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis penerapan hasil pengembangan aplikasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pelayanan pengujian laboratorium secara mikrobiologis, organoleptik, kimia dan fisika terhadap kualitas air dan lingkungan budidaya ikan air payau dan laut;
- h. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyediaan induk unggul ikan air payau dan laut dalam rangka menunjang kegiatan unit pembenihan ikan air payau dan laut;
- i. Pelaksanaan pelayanan teknis perbenihan dan budidaya air payau dan laut;
- j. Pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi mutu benih ikan air payau dan laut;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
- l. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan budidaya air payau dan laut yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2018 berjumlah 134 orang yang terdiri dari 95 orang berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang berjenis kelamin perempuan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2. Jumlah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan prov. Kalbar berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional TA. 2018

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL		STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-	Pembina Utama	-	-	Esselon I/b	-	-
S2	16	Org	Pembina Utama Madya	-	-	Esselon II/a	1	Org
S1/DIV	58	Org	Pembina Utama Muda	1	Org	Esselon II/b	-	-
DIPLOMA III	16	Org	Pembina Tingkat I	4	Org	Esselon III/a	5	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	10	Org	Esselon III/b	2	Org
SMA/SMK	39	Org	Penata Tingkat I	38	Org	Esselon IV/a	14	Org
SMP	2	Org	Penata	9	Org	Esselon IV/b	9	Org
SD	3	Org	Penata Muda Tingkat I	24	Org	Fungsional Widyaaiswara	-	-
			Penata Muda	7	Org	Fungsional Auditor	-	-
			Pengatur Tingkat I	11	Org	Fungsional Kepegawaian	-	-
			Pengatur	25	Org	Fungsional Arsiparis	-	-
			Pengatur Muda Tingkat I	1	Org	Dokter	-	-
			Pengatur Muda	1	Org	Bidan/Perawat	-	-
			Juru	3	Org	Fungsional Pranata Komputer	-	-
						Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5	Org
						Fungsional Umum /Staf	98	Org
JUMLAH	134	Org	JUMLAH	134	Org	JUMLAH	134	Org

Sumber: DUK Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018

Adapun daftar pegawai per golongan, per jabatan dan per tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Tahun 2018 sebagaimana *terlampir*.

E. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, telah tersedia gedung kantor yang memadai serta perlengkapannya yang masih baik, berikut sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan :



Tabel 3. Data Inventaris Asset

No.	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH AKHIR Desember 2018		KONDISI
		Jumlah		
		Barang	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	TANAH (KIB A)	22	1.182.229.081	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN (KIB B)	1.019	20.580.352.764	Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)	68	20.041.231.167	Baik
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)	18	6.151.780.987	Baik
5	ASET TETAP LAINNYA (KIB E)	8	104.438.872	Baik
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KIB F)	-	-	
	Jumlah	1.135	48.060.032.871	

Sumber data : Data Sementara Daftar Inventaris 2018



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

VISI Kepala Daerah Berdasarkan kondisi Provinsi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahunan dan amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJM Nasional, maka Visi Kepala Daerah : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”**.

VISI SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga organisasi publik, perlu menangkap peluang-peluang baru. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat dibidang Kelautan dan Perikanan, mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan yang diinginkan. Perubahan-perubahan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani/nelayan. Untuk itu diperlukan adanya VISI dan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. VISI adalah merupakan cara pandang jauh kedepan yang mempunyai nilai-nilai luhur yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun VISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT YANG BERDAYA SAING, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT”

MISI SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

MISI adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan MISI, diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dan mengetahui tugas, fungsi, peran dan program kerja serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Proses perumusan misi tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan kondisi serta tuntutan lingkungan.



Sedangkan pernyataan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya untuk mengarahkan kegiatan yang lebih eksis dan dapat mengikuti efek globalisasi. Adapun **MISI** dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kalbar yang semakin maju, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan pengelolaan usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat yang tertib dan taat hukum serta peraturan per UU yang berlaku.

B. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun 2013 – 2018

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun kedepan.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Idealistik – mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil ;
2. Jangkauan jauh kedepan – dicapai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi;
3. Abstrak - belum tergambar dalam angka (kualitatif), upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus menerus/ berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan **TUJUAN** sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan.



4. Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kalbar yang semakin maju, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya pengelolaan usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat yang tertib dan taat hukum serta peraturan per UU yang berlaku.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan. **Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai Berikut :**

1. Meningkatkan kemampuan pegawai yang profesional dengan didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan tata kelola organisasi kepada publik yang optimal dengan mengacu prinsip-prinsip Good Governance
2. Semakin optimalnya program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung oleh data dan informasi kelautan dan perikanan yang valid, up to date dan aktual
3. Semakin meningkatnya capaian out put dan out come pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
4. Semakin optimalnya penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mendukung IPM Kalbar.
5. Meningkatnya pengembangan kawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kepastian hukum untuk usaha pada sektor kelautan dan perikanan
6. Meningkatnya fungsi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk habitat dan berkembangbiaknya sumberdaya ikan Kalbar
7. Meningkatnya produktifitas usaha Perikanan Tangkap Melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan SDI secara Optimal
8. Semakin Optimalnya Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Sui Rengas untuk Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
9. Meningkatnya produktifitas Usaha Perikanan Budidaya Melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Terpeliharanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan
10. Optimalisasi Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana dan Peningkatan Produksi Induk dan Benih Ikan Unggul Balai Benih Ikan Sentral untuk Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
11. Meningkatnya Produktifitas Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan melalui Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Promosi Secara Optimal



12. Semakin Optimalnya Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Laboratorium untuk Layanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
13. Meningkatnya unit usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Kalbar yang taat hukum dan memiliki izin usaha sesuai per UU yang berlaku
14. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya tindak kejahatan hukum pada sektor kelautan dan perikanan Kalbar

C. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi pengelolaan dan pemanfaatan urusan kelautan dan perikanan diarahkan kepada peningkatan produksi dan daya saing komoditas produk hasil perikanan secara lestari dan berkelanjutan yang berdampak terhadap meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat Kalbar per kapita per tahun, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan; nelayan, pembudidaya ikan, pengolah serta pemasar komoditas produk hasil perikanan dan berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kelautan dan perikanan.

Strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemetaan wilayah perairan yang layak secara teknis untuk usaha perikanan dan penyusunan RTRW dan Perda Tata ruang untuk sektor kelautan dan perikanan Kalbar
2. Optimalisasi pengelolaan, rehabilitasi ekosistem perairan dan pemulihan habitat sumberdaya ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalbar
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui lptek dan kegiatan ekonomi produktif
4. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
5. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
6. Optimalisasi peningkatan nilai tambah dan peningkatan promosi produk-produk olahan hasil perikanan melalui kegiatan pameran dan media masa
7. Optimalisasi dalam pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pada sektor kelautan dan perikanan Kalbar untuk taat hukum dan per UU yang berlaku



8. Optimalisasi Pelayanan kepada Nelayan dan Masyarakat Perikanan melalui Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Sesuai Standar Teknis dan Kebutuhan Nelayan di PPP Sui Rengas
9. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana produksi dan pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas dan peran BBIS
10. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan dan Hasil Uji Mutu Labotarium kepada Masyarakat Perikanan pada LPPMHP Sui Rengas

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan mata pekerjaan yang diambil oleh pemerintah dalam lingkup tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional dan daerah, dasar kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan selain bertumpu pada landasan idiil Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 45, juga pada landasan Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2013 – 2018. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran adalah dengan menentukan kebijakan.

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan diarahkan pada :

- 1) Melaksanakan pemetaan potensi untuk pengembangan usaha pada sektor kelautan dan perikanan serta melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem perairan serta pemulihan habitat sumberdaya ikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalbar.
- 3) Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui lptek dan kegiatan ekonomi produktif.
- 4) Mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap melalui pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan tangkap dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.



- 5) Mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya melalui pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- 6) Mendorong peningkatan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan melalui inovasi dan diversifikasi serta penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta promosi produk olahan hasil perikanan melalui media masa dan pameran.
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pada sektor kelautan dan perikanan untuk taat dan tertib hukum sesuai UU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya

D. Program Nasional yang Dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

Dari 9 (sembilan) Program Nasional hanya 6 (enam) yang diakomodir di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai kewenangan

Jumlah program nasional (RKP), sebanyak 9 Program

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
3. Program Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
6. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
7. Program Pengelolaan Ruang Laut
8. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 Program sesuai kewenangan

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengelolaan Ruang Laut
6. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

E. Standar Pelayanan Umum (Standar Operational Procedur “SOP”) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

1. Penetapan SOP



SOP ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas no. 86.A Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018

2. Jumlah SOP (Teknis) Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar
Daftar SOP teknis yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar sebagai berikut :
 1. Penerimaan Hibah Kepada Masyarakat
 2. Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap (Rekomendasi)
 3. Inspeksi Pembongkaran Ikan
 4. Pelayanan Log Book Penangkapan Ikan
 5. Pelayanan Pengawasan Mutu
 6. Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
 7. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
 8. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan
 9. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
 10. Pelayanan Floating Repair
 11. Masuk Pelabuhan Perikanan Security Dan Keamanan Aset
 12. Kebersihan Lingkungan Pelabuhan Perikanan
 13. Jasa Pengadaan Air Bersih
 14. Pas Masuk Pelabuhan Harian
 15. Pas Masuk Pelabuhan Perikanan Berlangganan
 16. Penumpukan Barang
 17. Sewa Lahan (Tanah) dan Bangunan
 18. Penggunaan Crane House dan Crane Beroda
 19. Monitoring dan Pengambilan Sampel Residu
 20. Penilaian/Audit CPIB
 21. Penilaian/Audit CBIB
 22. Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
 23. Penjualan Ikan
 24. Penyediaan Induk Ikan/Udang
 25. Penyediaan Benih/Benur
 26. Fasilitasi Magang
 27. Penyediaan Hasil Uji Laboratorium
 28. Penerbitan Sertifikat Magang
 29. Monitoring Hasil Perikanan
 30. Penerapan Jaminan Mutu Produk
 31. Penerapan Standarisasi Produk
 32. Promosi Mutu Produk Hasil Perikanan
 33. Penilaian Standar Mutu Produk
 34. Pendataan Produk dan Pengolahan Hasil Perikanan



35. Pembinaan Kelayakan Pengolahan
36. Pengembangan Teknologi Pengolahan
37. Pengujian Boraks
38. Bidang Pengujian Mikrobiologi Angka Lempeng Total (ALT)
39. Bidang Pengujian Mikrobiologi Escheria Coli
40. Bidang Pengujian Mikrobiologi Vibrio Cholerae
41. Bidang Pengujian Mikrobiologi Vibrio Parahaemolyticus
42. Bidang Pengujian Mikrobiologi Stapylococcus Aureus
43. Pengujian Organoleptik
44. Bidang Pengujian Fisika (Suhu Pusat Ikan)
45. Bidang Pengujian Fisika (Bobot Tuntas)
46. Bidang Pengujian Mikrobiologi (Coliform)
47. Bidang Pengujian Membran Filter (Kualitas Air Intercocci Intestinal)
48. Bidang Pengujian Membran Filter Coli Form Sni Iso 9308-1:2010
49. Bidang Pengujian Membran Filter Escheria Coli Sni Iso 9308-1:2010
50. Bidang Pengujian Mikrobiologi Salmonella (Metode Chemwel)
51. Bidang Pengujian Mikrobiologi Vibrio Cholerae (Metode Chemwel)
52. Bidang Pengujian Mikrobiologi Uji Profiensi
53. Bidang Pengujian Listeria
54. Bidang Pengujian Mikrobiologi (Organoleptik)
55. Bidang Pengujian Mikrobiologi Validasi Dan Verifikasi Metode Pengujian
56. Pengujian Mikrobiologi Uji Profiensi
57. Pengujian Kadar Abu
58. Pengujian Kadar Air
59. Pengujian Kadar Lemak
60. Pengujian Kadar Protein
61. Pengujian Kadar Logam Berat Kadmium
62. Pengujian Serat Kasar
63. Pengujian Kadar Logam Berat Timbal (Pb)
64. Pengujian Kadar Logam Berat Merkuri (Hg)
65. Pengujian Kadar Residu Antibiotik Chlorampericol (Cap)
66. Pengujian Formalin
67. Uji Residu Antibiotik (Aoz)
68. Uji Residu Antibiotik (Amoz)

F. Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2018

1. Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2018



Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018
sebagaimana yang tertera pada *tabel 4*.

2. *Perda Pelaksanaan Peraturan Menteri*

Perda Retribusi Perizinan Tertentu Nomor 7 Tahun 2015.



Tabel 4. Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar Tahun Anggaran 2018

No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	√	√	√	√	√	√
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	√	√
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	√	√	√	√	√	√
c	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara	√	√	√	√	√	√
d	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	√	√	√	√	√	√
e	Penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi/iklan dan pemeliharaan arsip	√	√	√	√	√	√
f	Penyediaan jasa kebersihan kantor	√	√	√	√	√	√
g	Penyediaan jasa administrasi keuangan	√	√	√	√	√	√
h	Penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor, rumah jabatan, pendukung perkantoran lainnya	√	√	√	√	√	√
i	Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang	√	√	√	√	√	√
j	Penyediaan makanan dan minuman	√	√	√	√	√	√
k	Penyediaan bahan bacaan dan per UU	√	√	√	√	√	√
l	Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	√	√	√	√	√	√



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
m	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	√	√	√	√	√	√
n	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	√	√	√
o	Penyediaan alat tulis kantor	√	√	√	√	√	√
p	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	√	√	√	√	√	√
q	Penyediaan Informasi SKPD melalui Media Cetak dan Elektronik	√	√	√	√	√	√
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	√	√	√	√	√	√
a	Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
b	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	√	√	√	√	√	√
c	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	√	√	√	√	√	√
e	Pemeliharaan Taman/Lahan Kantor/Halaman rumah Jabatan	√	√	√	√	√	√
f	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	√	√	√	√	√	√
g	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	√	√	√	√	√	√
h	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	√	√	√	√	√	√

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN 2018



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	√	√	√	√	√	√
j	Pengadaan Meubelair Kantor	√	√	√	√	√	√
k	Pengadaan perlengkapan/peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	√	√		√	√	√
l	Pemeliharaan Instalasi Listrik/Telpon	√	√	√	√	√	√
m	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin pompa Air	√	√	√	√	√	√
n	Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor	√	√	√	√	√	√
o	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	√	√	√	√	√	√
p	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	√	√	√	√	√	√
q	Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator	√	√	√	√	√	√
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	√	√	√	√	√	√
a	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	√	√	√	√	√	√



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	√	√	√	√	√	√
a	Pendidikan dan Pelatihan	√	√	√	√	√	√
b	Pembinaan Jasmani dan Rohani	√	√	√	√	√	√
c	Penyusunan Analisis Jabatan	√	√	√	√	√	√
d	Standar Operasional Prosedur Dinas	√	√	√	√	√	√
e	Penetapan Kinerja	√	√	√	√	√	√
f	Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop	√	√	√	√	√	√
g	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√	√	√	√	x
V	Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√	√	√	√	√
a	Penyusunan Laporan Keuangan	√	√	√	√	√	√
b	Penyusunan Lakip	√	√	√	√	√	√
c	Penyusunan Renstra	√	√	√	√	√	√
d	Penyusunan Renja SKPD	√	√	√	√	√	√
e	Penyusunan LPPD dan LKPJ	√	√	√	√	√	√
f	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	√	√	√	√	√	√
g	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	√	√	√	√	√	√
h	Penyusunan Rencana Teknis SKPD Tingkat Provinsi	√	√	√	√	√	√



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
i	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	√	√	√	√	√	√
VI	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	√	√	√	√	√	√
a	Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset	√	√	√	√	√	√
VII	Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√	√	√
a	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√	√	√
b	Rehabilitasi dan Konservasi Ekosistem sebagai Habitat Sumberdaya Ikan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√	√	√
c	Pengembangan dan Pembinaan Desa Mandiri di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√
d	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	√	√	√	√	√	√
e	Rapat Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara Berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
f	Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalimantan Barat	√	√	√	√	√	√



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap	√	√	√	√	√	√
a	Apresiasi /Sosialisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Ramah Lingkungan, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	√	√	√	√	√	√
b	Pengumpulan dan Analisis Data CPUE (Catch Per Unit Effort) Perikanan Tangkap	√	√	√	√	√	√
c	Sosialisasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap	√	√	√	√	√	√
d	Pembuatan Apartemen/Rumah Ikan /Fish Shelter dan Rumpon di Perairan Laut Kalimantan Barat	√	√	√	√	√	√
e	Identifikasi, Pendataan dan Supervisi Pengembangan Pelabuhan Perikanan	√	√	√	√	√	√
f	Peningkatan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	√	√	√	√	√	√
g	Sosialisasi dan Pelaksanaan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan <30GT	√	√	√	√	√	√
h	Peningkatan Kompetensi Pengawakan Kapal Perikanan	√	√	√	√	√	x
i	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap Kalbar	√	√	√	√	√	x
j	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha	√	√	√	√	√	√

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bidang Perikanan Tangkap						
k	Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Teknologi Adaptif dan Terbarukan	√	√	√	√	√	√
l	Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Lingkungan	√	√	√	√	√	√
m	Percontohan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Ramah lingkungan	√	√	√	√	√	x
n	Bantuan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Menggunakan Teknologi Adaptif dan Terbarukan di Kab. Mempawah	√	√	√	√	√	√
o	Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Lingkungan Kab. Mempawah	√	√	√	√	√	√
p	Pengadaan/Bantuan Sarana Penangkapan Ramah Lingkungan Kab. Ketapang	√	√	√	√	√	√
q	Pengadaan/Bantuan Kapal Motor Penangkapan Ikan Desa Karimunting	√	√	√	√	√	√
r	Pengadaan/bantuan Kapal Motor Penangkapan Ikan Dusun Sungai Soga	√	√	√	√	√	√
IX	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya	√	√	√	√	√	√
a	Pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CPIB)	√	√	√	√	√	√



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
b	Pemantauan dan Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)	√	√	√	√	√	√
c	Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Payau	√	√	√	√	√	x
d	Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Laut	√	√	√	√	√	√
e	Pemantauan dan pengendalian hama, penyakit dan residu di kawasan usaha perikanan budidaya	√	√	√	√	√	√
f	Pemantauan dan pengendalian peredaran obat-obatan dan pakan untuk usaha perikanan budidaya	√	√	√	√	√	√
g	Optimalisasi pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	√	√	√	√	√	√
h	Bantuan Peralatan Pakan Ikan Mandiri	√	√	√	√	√	√
i	Percontohan Budidaya Ikan Unggul dan Memiliki Prospek Pasar yang Baik	√	√	√	√	√	√
j	Penyediaan Pakan Ikan untuk Pembudidaya	√	√	√	√	√	√
k	Penyediaan Calon Induk dan Benih Ikan untuk Pembudidaya (Tawar, Payau, dan Laut)	√	√	√	√	√	√
l	Bantuan Kolam Ikan Rakyat di Kabupaten Sintang	√	√	x	x	x	√
m	Bantuan Pakan Ikan di Kabupaten	√	√	√	x	√	√



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	Mempawah						
n	Bantuan Benih Ikan di Kabupaten Mempawah	√	√	√	x	√	√
o	Fasilitasi Magang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	√	√	x	x	√	√
p	Pengembangan Budidaya Air Payau	√	√	x	x	√	√
q	Pembenihan Udang Windu	√	√	x	x	√	√
r	Pembenihan Ikan Bandeng	√	√	x	x	√	√
q	Pembenihan Ikan Nila Salin	√	√	x	x	√	√
X	Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Serta Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	√	√	√	√	√	√
a	Pengembangan dan Peningkatan Sarana/Prasarana dalam rangka Mendukung Sistem Logistik Komoditas Hasil Perikanan Kalbar	√	√	√	√	√	√
b	Apresiasi Pengembangan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	√	√	√	√	√	√
c	Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan melalui Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahan Utama Ikan	√	√	√	√	√	x
d	Promosi Produk Hasil Perikanan ke dalam dan ke luar negeri/BIMB EAGA	√	√	√	√	√	√
e	Pembinaan serta Penghimpunan Informasi	√	√	√	√	√	√



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	Harga Pasar Produk Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi se-Kalbar						
f	Dukungan Forikan Kalbar	√	√	√	√	√	√
g	Pengelolaan Perizinan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Kalbar	√	√	√	√	√	√
h	Sertifikasi Kelayakan Unit Pengolah Hasil Perikanan	√	√	√	√	√	√
i	Monitoring Unit Pengolahan (UPI) ke Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√
j	Pembinaan dan Pemantauan Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	√	√	√	√	√	√
k	Pengadaan Sarana Pemasaran Kabupaten Mempawah	√	√	√	x	√	√
l	Pengadaan Sarana Pengolahan Kabupaten Mempawah	√	√	√	x	√	√
XI	Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	√
a	Rapat Teknis Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	√	√	√	√	√	x
b	Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan	√	√	√	√	√	√



No.	Program &Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Pemasaran Hasil Perikanan						
c	Gelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Ikan, Ekosistem Laut dan Jasa Kelautan	√	√	√	√	√	√
d	Bimtek untuk Petugas Pengawasan SDI Kalbar	√	√	√	√	√	x
e	Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas Perikanan	√	√	√	√	√	√
XII	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	√	√	√	√	√	√
a	Penerapan K5 (Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Keamanan dan Keselamatan di Pelabuhan Perikanan)	√	√	√	√	√	√
b	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan dan Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan Kalbar	√	√	√	√	√	√
c	Inspeksi Kapal Perikanan dan Pembinaan Mutu Ikan diatas Kapal	√	√	√	√	√	√
d	Pelayanan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	√	√	√	√	√	√
e	Pelayanan Pos Terpadu Pelabuhan Perikanan	√	√	√	√	√	√
f	Pelayanan Kepelabuhan	√	√	√	√	√	√



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN DAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN SUI RENGAS	√	√	√	√	√	√
a	Pengujian Profisiensi / Uji Banding Internal	√	√	√	√	√	√
b	Surveillance Laboratorium Akreditasi	√	√	√	√	√	√
c	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi	√	√	√	√	√	√
d	Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia	√	√	√	√	√	√
e	Pengadaan Media Reagensia	√	√	√	√	√	√
f	Audit Internal ISO Guide 01-17025	√	√	√	√	√	√
g	Kajiterap Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	√	√	√	√	√	√
h	Ketelusuran / Tranceability Supplier / Pemasok Hasil Perikanan dari Hulu ke Hilir	√	√	√	√	√	√
i	Monitoring Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di TPI / PPI. Pelabuhan Perikanan, Budidaya Ikan, Hatchery, Kapal Ikan dan Pasar	√	√	√	√	√	√
j	Pemeriksaan Sampel Produk Hasil Perikanan dan Hasil Olahan di Pasar-pasar Se-Kalbar	√	√	√	√	√	√

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 TAHUN 2018



No.	Program & Kegiatan	RENSTRA	RENJA	RKPD	RKA	DPA	DPAP
1	2	3	4	5	6	7	8
k	Pelayanan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Daerah Perbatasan	√	√	√	√	√	√

Keterangan	
Ada	√
Tidak Ada	x



BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Ringkasan Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar

Dalam rangka melaksanakan Urusan Pilihan sektor Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan melaksanakan sebanyak 11 program dan 90 kegiatan setelah revisi dan penghematan dengan urutan program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 16 kegiatan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 11 kegiatan
- c. Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari 5 kegiatan
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 8 kegiatan
- f. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan
- g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang terdiri dari 13 kegiatan
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang terdiri dari 15 kegiatan
- i. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang terdiri dari 11 kegiatan
- j. Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 3 kegiatan
- k. Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri dari 6 kegiatan



2. Ringkasan Urusan UPTD

➤ UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan (UPT PMHP)

Dalam rangka melaksanakan Urusan Pilihan sektor Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi UPT PMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan melaksanakan sebanyak 5 program dan 38 kegiatan setelah revisi dan penghematan dengan urutan program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 12 kegiatan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 6 kegiatan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari 4 kegiatan
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 5 kegiatan
- e. Program Pengembangan dan Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Fungsi Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang terdiri dari 11 kegiatan

➤ UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (UPT PBAPL)

Dalam rangka melaksanakan Urusan Pilihan sektor Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi UPT PBAPL Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan melaksanakan sebanyak 6 program dan 38 kegiatan setelah revisi dan penghematan dengan urutan program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 13 kegiatan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 12 kegiatan
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari 3 kegiatan
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 4 kegiatan
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang terdiri dari 5 kegiatan

➤ UPT Pelabuhan Perikanan

Dalam rangka melaksanakan Urusan Pilihan sektor Kelautan dan Perikanan maka tugas dan fungsi UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan



melaksanakan sebanyak 7 program dan 46 kegiatan setelah revisi dan penghematan dengan urutan program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 15 kegiatan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana yang terdiri dari 16 kegiatan
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 5 kegiatan
- f. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan
- g. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap yang terdiri dari 6 kegiatan

B. Anggaran Belanja dan Realisasi SKPD dan UPTD SKPD

Total alokasi dan realisasi dana APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 (**Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT PMHP, UPT PBAPL, UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat**) sebagaimana pada *Tabel 5*.

Kode Rekening	Instansi/organisasi	Anggaran Belanja	Realisasi				Total Realisasi Belanja	%
			Realisasi Belanja TL	Jenis Belanja				
				Pemeliharaan	Barang & Jasa	Modal		
Total SKPD		37.877.130.071	13.841.137.008	813.215.429	9.513.495.248	10.411.640.500	36.073.022.756	95,24
2.05.01.01	Tidak langsung	13.941.883.111	13.841.137.008				13.841.137.008	99,28
	Dinas	8.156.215.474		287.334.729	6.045.689.121	10.000.000	7.008.019.121	85,92
2.05.01.02	UPT PMHP	1.675.761.000		36.307.000	1.120.078.640	87.272.000	1.632.255.640	97,40
2.05.01.03	UPT PBAPL	5.650.695.575		67.222.000	961.902.365	3.936.583.600	5.393.360.965	95,45
2.05.01.05	UPT Pelabuhan Perikanan	8.452.574.911		422.351.700	1.385.825.122	6.377.784.900	8.198.250.022	96,99

C. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu : pelayanan permintaan data baik yang berasal dari instansi lintas sektoral maupun dari kalangan akademik. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan juga melaksanakan penerbitan rekomendasi/perizinan bagi pelaku usaha yang mengajukan dokumen perizinan bidang kelautan dan perikanan. Adapun capaian izin/rekomendasi tahun 2018 yang dikeluarkan yang sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebagai berikut :



No.	Bidang	Jenis Rekomendasi / Perizinan	Permohonan Pengajuan	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan	Dokumen yang ditolak
1	Perizinan Tangkap	Rekomendasi Penerbitan :			
		a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	57	49	8
		b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	122	111	11
		c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	18	14	4
		d. Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUPI)	3	0	3
		e. BBM	479	479	-
2	Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil	Rekomendasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)	20	20	-
		Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	9	9	-
		Surat Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan (SPPI)	19	19	-
		Surat Pengolahan Ikan (SPI)	5	5	-

Dokumen yang ditolak penerbitan rekomendasinya karena adanya ketidaksesuaian persyaratan dan kriteria yang tercantum dalam dokumen permohonan perizinan usaha perikanan tangkap dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.



D. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja, terdapat beberapa masalah yang muncul beserta solusi atau langkah-langkah yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Tingginya harga pakan dan ketersediaannya masih tergantung dari luar Kalbar sedangkan produksi pakan alternatif masih mengalami kendala kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu dan proses pengeringan yang masih mengandalkan pada panas matahari.
2. Penguasaan teknologi budidaya payau dan laut masih belum optimal
3. Masih banyak ditemui pelanggaran penangkapan ikan (illegal Unreported dan Unregulated Fishing) baik oleh kapal ikan asing maupun domestik, serta penangkapan ikan dengan merusak kualitas lingkungan (pengeboman, racun, dll)
4. Penertiban perizinan usaha penangkapan kapal 5 – 30 GT belum berjalan optimal

- Solusi

Solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan program GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri) serta meningkatkan sarana dan prasarana produksi pakan ikan alternatif
2. Melakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan teknologi budidaya air payau dan laut
3. Peningkatan pengawasan secara terpadu antara aparat TNI-AL, Polri dan Pengawas Perikanan
4. Melakukan Gerai Perizinan di Prov. Kalbar

E. Hal yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada



F. Indikator Kinerja Kunci

1. *Tataran Pengambil Kebijakan*

Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun 2018, **Tidak ada**

2. *Tataran Pelaksana Kebijakan*

a. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD dengan capaian kinerja 66,67 %

Dari 9 (sembilan) Program Nasional hanya 6 (enam) yang diakomodir di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sesuai kewenangan.

Jumlah program nasional (RKP), sebanyak 9 Program

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
3. Program Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
6. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
7. Program Pengelolaan Ruang Laut
8. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 Program

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengelolaan Ruang Laut
6. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



b. Keberadaan Standart Operating Procedure (SOP) Teknis : ada 68 SOP

1. Pemberian Hibah Kepada Masyarakat
2. Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap (Rekomendasi)
3. Inspeksi Pembongkaran Ikan
4. Pelayanan Log Book Penangkapan Ikan
5. Pelayanan Pengawasan Mutu
6. Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
7. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
8. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal Perikanan
9. Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
10. Pelayanan Floating Repair
11. Masuk Pelabuhan Perikanan Security Dan Keamanan Aset
12. Kebersihan Lingkungan Pelabuhan Perikanan
13. Jasa Pengadaan Air Bersih
14. Pas Masuk Pelabuhan Harian
15. Pas Masuk Pelabuhan Perikanan Berlangganan
16. Penumpukan Barang
17. Sewa Lahan (Tanah) Dan Bangunan
18. Penggunaan Crane House Dan Crane Beroda
19. Monitoring Dan Pengambilan Sampel Residu
20. Penilaian/Audit CPIB
21. Penilaian/Audit CBIB
22. Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
23. Penjualan Ikan
24. Penyediaan Induk Ikan/Udang
25. Penyediaan Benih/Benur
26. Fasilitasi Magang
27. Penyediaan Hasil Uji Laboratorium
28. Penerbitan Sertifikat Magang
29. Monitoring Hasil Perikanan
30. Penerapan Jaminan Mutu Produk
31. Penerapan Standarisasi Produk
32. Promosi Mutu Produk Hasil Perikanan
33. Penilaian Standar Mutu Produk
34. Pendataan Produk Dan Pengolahan Hasil Perikanan
35. Pembinaan Kelayakan Pengolahan
36. Pengembangan Teknologi Pengolahan
37. Pengujian Boraks



38. Bidang Pengujian Mikrobiologi Angka Lempeng Total (ALT)
39. Bidang Pengujian Mikrobiologi Escheria Coli
40. Bidang Pengujian Mikrobiologi Vibrio Cholerae
41. Bidang Pengujian Mikrobiologi Vibrio Parahaemolyticus
42. Bidang Pengujian Mikrobiologi Stapylococcus Aureus
43. Pengujian Organoleptik
44. Bidang Pengujian Fisika (Suhu Pusat Ikan)
45. Bidang Pengujian Fisika (Bobot Tuntas)
46. Bidang Pengujian Mikrobiologi (Coliform)
47. Bidang Pengujian Membran Filter (Kualitas Air Intercocci Intestiral)
48. Bidang Pengujian Membran Filter Coli Form Sni Iso 9308-1:2010
49. Bidang Pengujian Membran Filter Escheria Coli Sni Iso 9308-1:2010
50. Bidang Pengujian Mikrobiologi Salmonella (Metode Chemwel)
51. Bidang Pengujian Mikrobiologi Vibrio Cholerae (Metode Chemwel)
52. Bidang Pengujian Mikrobiologi Uji Profiensi
53. Bidang Pengujian Listeria
54. Bidang Pengujian Mikrobiologi (Organoleptik)
55. Bidang Pengujian Mikrobiologi Validasi Dan Verifikasi Metode Pengujian
56. Pengujian Mikrobiologi Uji Profiensi
57. Pengujian Kadar Abu
58. Pengujian Kadar Air
59. Pengujian Kadar Lemak
60. Pengujian Kadar Protein
61. Pengujian Kadar Logam Berat Kadmium
62. Pengujian Serat Kasar
63. Pengujian Kadar Logam Berat Timbal (Pb)
64. Pengujian Kadar Logam Berat Merkuri (Hg)
65. Pengujian Kadar Residu Antibiotik Chlorampericol (Cap)
66. Pengujian Formalin
67. Uji Residu Antibiotik (Aoz)
68. Uji Residu Antibiotik (Amoz)

- c. Jumlah Perda Pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN dengan capaian kinerja 100%**
Ada, Perda Retribusi Perizinan Tertentu Nomor 7 Tahun 2015



- d. Rasio Struktur jabatan dan eselonering yang terisi dengan capaian kinerja 93,94 %**
- Jabatan yang ada sebanyak 31 Jabatan
 - Jabatan yang harus ada sebanyak 33 jabatan
- e. Keberadaan Jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi SKPD dengan capaian Kinerja 5 pegawai fungsional.**
Pengawas perikanan bidang Pembudiyaaan ikan 5 orang
- f. Rasio PNS Provinsi dengan capaian kinerja 1,24 %**
Jumlah PNS di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan adalah 134 orang termasuk UPTD lingkup Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat
- g. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan kepemimpinan dengan capaian kinerja 83,87 %**
Jumlah Pejabat yang telah memenuhi persyaratan diklatpim sebanyak 26 orang, dari pejabat yang ada sebanyak 31 orang
- h. Pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan dengan capaian kinerja 93,94 %**
Jumlah Pejabat yang telah memenuhi Persyaratan Kepangkatan sebanyak 31 orang dari 33 Jabatan Struktural
- i. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA-SKPD, DPA dengan capaian kinerja 100 %**
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD sebanyak 4 dokumen yaitu :
1. Rencana Strategis SKPD
 2. Rencana Kerja SKPD
 3. RKA SKPD
 4. DPA SKPD
- j. Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja SKPD capaian kinerja 100%**
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana
 3. Program peningkatan disiplin aparatur
 4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur



5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan pengelolaan asset daerah
7. Program Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap
9. Program pengelolaan dan peningkatan nilai tambah serta optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
10. Program pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
11. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
12. Program Pengembangan dan Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Fungsi Laboratorium Pengendalian Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
13. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBIS
14. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

k. Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dengan capaian kinerja 100%

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program peningkatan pengelolaan asset daerah
7. Program Pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap
9. Program pengelolaan dan peningkatan nilai tambah serta optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
10. Program pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
11. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
12. Program Pengembangan dan Peningkatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dan Fungsi Laboratorium Pengendalian Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
13. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBIS
14. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap



l. Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

Tidak ada

m. Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD Rp. 37.877.130.071,-

n. Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja Modal terhadap belanja SKPD 28,95 %, dengan jumlah belanja modal Rp. 10.441.640.500,- terhadap belanja SKPD Rp. 36.073.022.756,-

o. Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

Belanja Pemeliharaan terhadap Belanja Barang dan Jasa 8,55 % dengan Jumlah Belanja Pemeliharaan Rp. 813.215.429,- terhadap Belanja Barang Jasa Rp. 9.513.495.248

p. Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

Belanja Pemeliharaan dari total Belanja SKPD 2,25% dengan jumlah Belanja Pemeliharaan Rp. 813.215.429,- terhadap Belanja SKPD Rp. 36.073.022.756,-

q. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada 3 Jenis Dokumen : Neraca, CALK, LRA

r. Keberadaan inventarisasi barang dan asset SKPD

Ada 6 Jenis Dokumen : KIB Tanah, KIB Peralatan dan Mesin, KIB Gedung dan Bangunan, KIB Jalan Irigasi dan Jaringan, KIB Aset Tetap Lainnya, KIB Konstruksi dalam Pengerjaan

s. Jumlah Aset yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah Aset yang tidak digunakan SKPD 0 %, dengan Jumlah aset yang tidak digunakan . Rp. 0,- Terhadap Aset yang dikuasai SKPD senilai Rp. 48.060.032.871,-

t. Jumlah fasilitas/prasarana informasi sebanyak 4 jenis

- Pos pengaduan
- Media website
- Leaflet
- Mobil Alih Teknologi Informasi (ATI)

u. Keberadaan survey kepuasan masyarakat

Ada



3. Tataran Pelaksana Kebijakan

No	Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Kunci (IKK)								
		Produksi Perikanan			Ekspor Perikanan			Konsumsi Ikan		
		Target (ton)	realisasi (ton)	Capaian Kinerja (%)	Target (ton)	realisasi (ton)	Capaian Kinerja (%)	Target	realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kabupaten Ketapang	61.323,19	42.738,92	69,69				43,48	49,41	113,64
2	Kabupaten Mempawah	23.753,51	13.442,10	56,59				41,90	48,83	116,54
3	Kabupaten Sambas	51.659,54	24.974,26	48,34				38,45	36,18	94,10
4	Kabupaten Bengkayang	5.971,17	8.453,00	141,56				39,27	36,75	93,58
5	Kota Singkawang	3.115,33	4.036,02	129,55				38,90	38,04	97,79
6	Kota Pontianak	12.259,84	2.700,30	22,03				33,94	41,75	123,01
7	Kabupaten Kayong Utara	30.336,15	35.394,84	116,68				35,65	64,46	180,81
8	Kabupaten Kubu Raya	40.672,02	28.084,60	69,05				47,12	37,84	80,31
9	Kabupaten Sanggau	4.088,31	9.220,42	225,53				27,51	29,36	106,72
10	Kabupaten Landak	1.503,16	1.323,95	88,08				34,09	35,58	104,37
11	Kabupaten Sekadau	1.425,05	2.303,28	161,63				25,90	29,11	112,39
12	Kabupaten Melawi	4.550,25	6.936,90	152,45				30,78	32,07	104,19
13	Kabupaten Sintang	3.999,57	3.554,07	88,86				34,69	26,97	77,75
14	Kabupaten Kapuas Hulu	31.820,87	65.510,00	205,87				42,82	39,08	91,27
	JUMLAH	276.477,96	248.672,66	112,57	3.221,00	1.944,04	60,36	36,75	38,91	106,89

**Data sementara tahun 2018*



B A B. IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Andon Penangkapan Ikan dengan Provinsi Jawa Tengah

1. Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 523.33/2400/2018 dan 027/713/DKP-PT.
2. Dasar Hukum kerjasama adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan.
3. Kerjasama merupakan kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap dengan objek hukum andon penangkapan ikan.
4. Nama kegiatan yaitu Kerjasama Andon Penangkapan Ikan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dari Bidang yang melaksanakan kerjasama adalah sebagai berikut :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-	Pembina Utama	-	-
S2	2	Org	Pembina Utama Madya	-	-
S1/DIV	7	Org	Pembina Utama Muda	-	Org
DIPLOMA III	2	Org	Pembina Tingkat I	1	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	-	Org
SMA/SMK	2	Org	Penata Tingkat I	6	Org
SMP	-	Org	Penata	2	Org
SD	-	Org	Penata Muda Tingkat I	1	Org
			Penata Muda	-	Org
			Pengatur Tingkat I	1	Org
			Pengatur	2	Org
			Pengatur Muda Tingkat I	-	Org
			Pengatur Muda	-	Org
			Juru	-	Org
JUMLAH	13	Org	JUMLAH	13	Org

7. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang termasuk dalam kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha



Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah anggaran total sebesar Rp. 153.354.500,-

8. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 21 Agustus 2018 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
9. Hasil (output) dari kerjasama belum ada, karena belum ada perizinan/SIPI andon dari Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan, namun maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.
10. Permasalahan dan solusi, tidak ada.
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tidak ada.

B. Kerjasama Andon Penangkapan Ikan dengan Provinsi Kepulauan Riau

1. Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor 523/DKP-PT/001/XI/2018 dan 027/955/DKP-PT.
2. Dasar Hukum kerjasama adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan.
3. Kerjasama merupakan kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap dengan objek hukum andon penangkapan ikan.
4. Nama kegiatan yaitu Kerjasama Andon Penangkapan Ikan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dari Bidang yang melaksanakan kerjasama adalah sebagai berikut :

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-	Pembina Utama	-	-
S2	2	Org	Pembina Utama Madya	-	-
S1/DIV	7	Org	Pembina Utama Muda	-	Org
DIPLOMA III	2	Org	Pembina Tingkat I	1	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	-	Org
SMA/SMK	2	Org	Penata Tingkat I	6	Org
SMP	-	Org	Penata	2	Org
SD	-	Org	Penata Muda Tingkat I	1	Org
			Penata Muda	-	Org



KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
			Pengatur Tingkat I	1	Org
			Pengatur	2	Org
			Pengatur Muda Tingkat I	-	Org
			Pengatur Muda	-	Org
			Juru	-	Org
JUMLAH	13	Org	JUMLAH	13	Org

7. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang termasuk dalam kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah anggaran total sebesar Rp. 153.354.500,-
8. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 2 November 2018 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
9. Hasil (output) dari kerjasama belum ada, karena belum ada perizinan/SIPI andon dari Provinsi Kepulauan Riau yang diterbitkan, namun maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.
10. Permasalahan dan solusi, tidak ada.
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tidak ada.

C. Kerjasama Andon Penangkapan Ikan dengan Provinsi Jawa Barat

1. Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Jawa Barat yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan nomor 523.411/11546/Tangkap dan 027/129/DKP_PT.
2. Dasar Hukum kerjasama adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 36/PERMEN-KP/2016 tentang Andon Penangkapan Ikan.
3. Kerjasama merupakan kerjasama sektor Kelautan dan Perikanan di Bidang Perikanan Tangkap dengan objek hukum andon penangkapan ikan.
4. Nama kegiatan yaitu Kerjasama Andon Penangkapan Ikan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dari Bidang yang melaksanakan kerjasama adalah sebagai berikut :



KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-	Pembina Utama	-	-
S2	2	Org	Pembina Utama Madya	-	-
S1/DIV	7	Org	Pembina Utama Muda	-	Org
DIPLOMA III	2	Org	Pembina Tingkat I	1	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	-	Org
SMA/SMK	2	Org	Penata Tingkat I	6	Org
SMP	-	Org	Penata	2	Org
SD	-	Org	Penata Muda Tingkat I	1	Org
			Penata Muda	-	Org
			Pengatur Tingkat I	1	Org
			Pengatur	2	Org
			Pengatur Muda Tingkat I	-	Org
			Pengatur Muda	-	Org
			Juru	-	Org
JUMLAH	13	Org	JUMLAH	13	Org

7. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang termasuk dalam kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Bidang Perikanan Tangkap dengan jumlah anggaran total sebesar Rp. 153.354.500,-
8. Jangka waktu kerjasama adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani yaitu tanggal 20 Desember 2018 dan dapat dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali untuk perbaikan.
9. Hasil (output) dari kerjasama belum ada, karena belum ada perizinan/SIPI andon dari Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan, namun maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian andon penangkapan ikan.
10. Permasalahan dan solusi, tidak ada.
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan, tidak ada.



BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pada Tahun Anggaran 2018 secara umum telah dilaksanakan, baik yang ada pada bidang teknis maupun yang ada di UPTD lingkup dinas, sebagaimana telah dituangkan didalam renstra 2013-2018 dan renja dinas tahun 2018.

Indikator kinerja utama dinas yang mencakup volume produksi perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya) pada tahun anggaran 2018 telah tercapai sebesar 248.672,66 ton atau sebesar 89,94% dengan rincian perikanan tangkap sebesar 165.445,27 ton atau sebesar 86,84 % dan Perikanan Budidaya sebesar 83.227,39 ton atau sebesar 96,97% dari target yang telah ditetapkan.

Dampak positif secara langsung dari pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan ini antara lain; telah mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi baru pada sektor usaha kelautan dan perikanan beserta usaha pendukungnya, penyerapan tenaga kerja baru pada sektor perikanan, meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat Kalimantan Barat karena ketersediaan protein asal ikan tersedia secara cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Namun demikian, tidak semua program dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa program dan kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus dan kerja keras secara sinergis lintas bidang dan lintas kabupaten / kota se- Kalbar agar capaian program yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan Kalimantan Barat yang lebih sejahtera. Sebagai contoh beberapa kegiatan yang perlu kerja keras bersama, antara lain; penyediaan calon induk ikan unggul dan benih ikan unggul bagi pembudidaya ikan secara berkecukupan, pembinaan teknis kelompok usaha perikanan, penguatan permodalan, masih terjadinya pencemaran dan pengrusakan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawasan kelautan dan perikanan, perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan, penguatan dalam pengelolaan data, informasi dan statistik kelautan dan perikanan se- Kalbar.



B. Saran

1. Pembinaan teknis kepada kelompok usaha perikanan (KUB, Pokdakan, Poklahsarkan, Pokmaswas) perlu dilakukan secara lebih intensif agar kelompok pelaku usaha perikanan Kalimantan Barat secara bertahap dapat tumbuh dan berkembang skala usahanya menjadi besar dan menguntungkan dengan melibatkan peran serta petugas teknis dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota dan penyuluh perikanan se- Kalbar.
2. Dalam upaya meningkatkan skala usaha dan permodalan bagi kelompok usaha perikanan, dinas perlu memberdayakan secara optimal Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan penyuluh perikanan untuk pendampingan kelompok usaha perikanan mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan/perbankan, dimana sebagian besar kelompok usaha perikanan Kalbar pada saat ini masih kesulitan mendapat modal usaha dari lembaga keuangan/Bank.
3. Perlu mengintensifkan kegiatan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan dari berbagai aktifitas illegal dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar sumberdaya ikan Kalimantan Barat tetap lestari dan berkelanjutan .
4. Perlu terus melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan serta habitatnya.
5. Perlu meningkatkan validitas dalam pengelolaan data dan statistik kelautan dan perikanan dengan meningkatkan skill dan koordinasi petugas pengumpul data statistik kelautan dan perikanan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten / kota se- Kalbar